



Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen, Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengambilan Keputusan Manajemen Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Andri Hasmoro Kusumo Broto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Madiun
andri@unmer-madiun.ac.id

Abstract

Regional revenue department is organizing the affairs of government and public services in local revenue. Along with the change and development of information technology, leadership and information systems Revenue requires relevant and timely in its decision making. So as to improve organizational objectives that have been set previously . This study aimed to test empirically the effect of accounting information quality management , the effectiveness of tax administration and tax compliance simultaneously or partially (directly or indirectly) through management decisions to local tax revenue at revenue district / city in the province of West Java . The method used in this study is a survey method Explanation (Explanatory Survey Method) . The sample in this study is the overall population. This study was conducted in 26 Revenue Districts / Municipalities in the province of West Java . The data used is primary data and secondary data , then data collection is done through a questionnaire . The analytical method used is the Path Analysis (Path Analysis) . The results showed that simultaneous and partially Accounting Information Quality Management , Effectiveness of Tax Administration , Taxpayer Compliance and both direct and indirect (through management decisions) affect the Local Tax Receipts .

Keywords : Information Management Accounting, Tax Administration, Taxpayer Compliance, Local Tax Revenues, Quality and Information systems

Abstrak

Dinas pendapatan daerah (Dispenda) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pimpinan membutuhkan sistem dan informasi yang relevan dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat meningkatkan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara simultan maupun parsial (langsung maupun tidak langsung) melalui pengambilan keputusan manajemen terhadap penerimaan pajak daerah pada Dispenda Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survei Penjelasan (*Explanatory Survei Method*). Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang ada. Penelitian ini dilakukan pada 26 Dispenda Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen, Efektivitas Administrasi Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak baik Langsung maupun tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Kata Kunci: Informasi Akuntansi Manajemen, Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Daerah, Kualitas Sistem dan Informasi

PENDAHULUAN

Peranan sektor perpajakan sebagai sektor pendapatan non migas dalam pembangunan nasional dinilai sangat penting dan dominan, karena sumbangan dari sektor perpajakan ditargetkan oleh pemerintah setiap tahunnya cukup besar. Namun proporsi penerimaan migas terus menurun dari tahun ke tahun, sedangkan tugas-tugas, fungsi-fungsi dan aktivitas kenegaraan pemerintah semakin bertambah kompleks dan banyak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menggalakkan sumber penerimaan pemerintah lainnya, khususnya sumber utama penerimaan negara yaitu pajak

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia bergulir, pembangunan daerah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat di antaranya akibat dukungan dari sektor fiskal (Purnomo, 2009). Kemajuan tersebut menuntut berbagai kebijakan fiskal yaitu kebijakan dalam menjalankan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar (Musgrave dan Musgrave, 1989; James dan Alley, 2004). Bilamana dikaitkan dengan kemajuan perekonomian daerah atau pemerintah provinsi di Indonesia, maka kemajuan tersebut juga memperlihatkan terjadinya ketimpangan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, ketimpangan sumber pembiayaan kegiatan rutin dan program-program pembangunan ekonomi daerah di Indonesia menunjukkan keragaman kemampuan daerah atau pemerintah provinsi dalam menggali potensi penerimaan murni daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan penerimaan asli daerah lain yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat tiga tantangan informasi yang dihadapi oleh pengambil keputusan, yaitu (1) apa, kapan dan bentuk informasi yang dibutuhkan, (2) bagaimana memperoleh, menguji dan mengkombinasikan informasi serta mengintegrasikannya ke dalam kesatuan informasi yang utuh, (3) pemrosesan data dan sistem akuntansi perlu dilaksanakan secara bersama-sama untuk mengurangi ketidakbermaknaan dan meningkatkan keseimbangan (Laudon dan Laudon, 2012; McLeod dan Schell, 2008).

Ukuran keberhasilan pengembangan sistem informasi dapat dilihat dari bagaimana layanan yang diberikan oleh sistem informasi. Layanan dari sistem informasi perusahaan dapat dilihat akurasi data proses dan output sistem, reliabilitas, kemudahan penggunaan, fleksibilitas dan koordinasi dengan sistem yang lain. Sistem informasi dikembangkan untuk digunakan oleh pengguna dalam mendukung operasi hariannya. Sistem informasi merupakan komponen perusahaan yang tugasnya menghasilkan informasi guna memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan (O'Brien & Marakas, 2010). Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi perpajakan yang berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen di bidang perpajakan.

Dalam konteks pembangunan di daerah, peran pemerintah daerah sebagai penggerak roda perekonomian akan tercermin dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local*

discretion) dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Untuk meningkatkan otonomi daerah, diperlukan struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih menuju ke arah kemandirian keuangan daerah antara lain melalui pelimpahan sumber-sumber pajak menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi daerah yang menitikberatkan pada pajak-pajak dan pungutan lainnya yang potensial, bagi hasil pajak dan bukan pajak yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah.

Pentingnya pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD telah mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah. Pemerintah Kab/Kota dituntut untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, harus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya mengupayakan peningkatan penerimaan dari sektor pajak dengan cara memberdayakan (*empowerment*) petugas pajak dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak guna mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam sistem perpajakan yang masih belum efektif menurut Widodo & Djefris (2010) adalah mengenai teknologi informasi perpajakan. Perbaikan teknologi informasi dan penerapannya yang dimaksud adalah menekankan usaha untuk menyempurnakan sistem informasi pajak, sistem informasi pengolahan data, dan sistem manajemen informasi objek pajak yang terintegrasi atau terpadu untuk membangun transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan perpajakan. Pada dasarnya sistem perpajakan yang mempengaruhi timbulnya motivasi dalam membayar pajak adalah mengandung aspek kemudahan, yang berarti kemudahan mendapatkan SPT dan mengisi SPT.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan yang berkaitan kualitas informasi perpajakan ditambahkan dengan faktor penentu keberhasilan perpajakan dalam pemungutan pajak, dalam hal ini adalah administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sistem informasi menghasilkan informasi yang memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan (O'Brien & Marakas, 2010). Hal senada dikemukakan oleh Wilkinson (2000), yaitu sistem informasi dikembangkan untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan para pemakainya. Selanjutnya O'Donnell & David (2000) mengemukakan bahwa dengan adanya sistem informasi yang memadai, maka penegelolaan keuangan daerah akan semakin terbuka dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Pemenuhan kebutuhan informasi yang berkualitas, harus ada hubungan antara informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dengan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan (Laudon dan Laudon, 2012). Hal senada dikemukakan McLeod dan Schell (2008) mengemukakan bahwa informasi yang diberikan kepada setiap manajer dalam suatu organisasi, bergantung kepada tingkat kedudukan para manajer dalam organisasi tersebut. Hasil penelitian DeLone dan McLean, (2003), berkesimpulan bahwa ada ketidakpuasan atas kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi, dikarenakan kurang sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen

Suatu sistem informasi dikatakan dapat menghasilkan informasi yang berguna, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) *Usefulness*, yaitu suatu sistem harus dapat menghasilkan informasi yang berguna; (2) *Economy*, yaitu seluruh elemen dari sistem informasi harus dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan; (3) *Customer Service*, yaitu system informasi yang baik adalah untuk memberikan kepuasan kepada pemakainya; (4) *Capacity*, yaitu sistem harus dirancang untuk dapat menampung seluruh kegiatan perusahaan; (5) *Simplicity*, yaitu sistem yang dibuat harus cukup sedemana; (6) *Reliability*, yaitu disain sistem serta peralatan yang digunakan harus layak pakai; (7) *Flexibility*, yaitu suatu sistem dirancang untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam bisnisnya (Dreachslin, 1998; Emerson, 1998; Laudon dan Laudon, 2005; McLeod dan Schell, 2008). Dalam hasil penelitian Arya and Schroeder (2004) menyimpulkan bahwa Guna menghasilkan informasi yang memuaskan kebutuhan pemakai (dalam arti kata mengandung unsur relevan, akurat, tepat waktu, lengkap dan mudah untuk dianalisa) diperlukan suatu sistem informasi yang andal, dengan tidak mengabaikan unsur efisiensi dan efektifitas.

Demikian pula dengan sistem informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu sub sistem informasi akuntansi, maka akan menghasilkan informasi akuntansi manajemen yang akan digunakan oleh kepala dinas sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan. Nilai dari suatu informasi dapat mempengaruhi kualitas dari informasi tersebut. Kualitas informasi pada dasarnya menunjukkan ukuran-ukuran dari output sistem informasi. Informasi berkualitas menurut Wilkinson *et. Al* (2000) memenuhi kriteria *relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, dan consistency*. Dalam penelitian De Lone & Mc Lean (2003), Kualitas Informasi diukur melalui *Completeness, Ease of understanding, Personalization, Relevance, Security*. Informasi yang tidak berkualitas akan menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak tepat.

Informasi akuntansi manajemen dapat membantu manajemen mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan digunakan dalam semua lingkup manajemen, meliputi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, kebutuhan akan informasi tidak terbatas pada organisasi manufaktur, tetapi juga mencakup organisasi dagang dan jasa (Balakishnan dan Sivaramakrishnan, 2002; Dhavale, 2007; Chapman, Hopwood dan Shields, 2007).

Dalam suatu proses perencanaan dan pengendalian diperlukan informasi sebagai kumpulan fakta, data, pengamatan, persepsi atau manusia yang lain, yang relevan dengan aktivitas perusahaan. Informasi diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan di antara sekian banyak alternatif yang tersedia (Anthony *at al*, 2003). Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam perusahaan juga selalu berusaha mengumpulkan untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut (Chapman, Hopwood dan Shelds, 2007).

Kualitas informasi akuntansi manajemen dalam penelitian ini dimaknai sebagai gap (kesenjangan) antara apa yang **diharapkan** dari informasi akuntansi manajemen tersebut dengan apa yang **dihasilkan** dari informasi akuntansi manajemen. Hal ini berarti bahwa semakin kecil gap antara keduanya, maka semakin berkualitas informasi akuntansi manajemen tersebut, dan semakin besar gap anantara keduanya maka semakin tidak berkualitas informasi

akuntansi manajemen tersebut (Balakishnan dan Sivaramakrishnan, 2002; Anthony, 2003; Dhavale, 200; Chapman, Hopwood dan Shelds, 2007).

Informasi akuntansi manajemen diukur dari: (1) **Kelengkapan (*completeness*) informasi**, yang meliputi kelengkapan informasi yang dihasilkan dan mencerminkan dari kejadian yang sebenarnya (representasi); (2) **Kemudahan dalam memahami (*ease of understanding*) informasi**, yang meliputi penyajian dalam bentuk yang bermanfaat dan mudah dimengerti; (3) **Personalisasi (*Personalization*)**, yang meliputi: kesesuaian atau tidak bentuk / form dari informasi akuntansi manajemen; (4) **Relevansi (*Relevance*)** antara informasi dengan pengambilan keputusan, yang meliputi: probabilitas dan dukungan pada keputusan; (5) **Kemanan (*security*)**, yang meliputi : keamanan dalam dapat terjadi karena tidak semua orang dapat mengakses (menggunakan *password*) dan memiliki *back-up* data (Wilkinson, *et., al*, 2000; De Lone & Mc Lean, 2003)

Efektivitas Administrasi Perpajakan

Efektivitas secara umum menunjukkan tingkat dimana sesuatu yang efektif atau sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Istilah efektivitas diadopsi dari kata dalam Bahasa Inggris : *effectiveness*, yang asal katanya *effective*. Wikipedia Dictionary mendefinisikan *effective* sebagai berikut :

1. *Having the power to produce a required effect or effects.*

Memiliki kekuatan untuk menghasilkan efek yang diperlukan atau berdampak.

2. *Producing a decided or decisive effect.*

Menghasilkan efek memutuskan atau menentukan.

3. *Efficient, serviceable, or operative, available for useful work.*

Efisien, berguna, atau operatif, tersedia untuk pekerjaan yang berguna.

4. *Actually in effect.*

Sebenarnya berlaku

Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2009), yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan tujuan dengan hasil yang dicapai.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga/ organisasi pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Pengalaman di berbagai negara, resep dasar untuk administrasi perpajakan yang efektif hanya memiliki tiga komponen, yaitu 1) kemauan politik untuk mengelola sistem pajak secara efektif, 2) strategi yang jelas untuk mencapai tujuan ini, dan 3) sumber daya yang memadai untuk tugas tersebut. (Bird, 2008).

Administrasi perpajakan yang kurang baik, menjadikan proses pemungutan pajak berjalan lambat, memakan waktu yang lama dan berbelit-belit yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa keraguan dan keengganan bagi wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif melakukan pembayaran pajak.

Hal diatas menggambarkan bahwa masih lemahnya administrasi pajak daerah, mulai dari kelengkapan data subjek dan objek pajak, pengawasan, penagihan serta masih kurangnya program sosialisasi (penyuluhan) kepada wajib pajak tentang pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpatuhan wajib pajak. Tugas utama dari suatu administrasi perpajakan adalah

memfasilitasi ketidakpatuhan, mengawasi kepatuhan, dan menghadapi ketidakpatuhan. (Bird, 2008).

Efektivitas Administrasi Perpajakan dalam penelitian ini dimaknai sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*) dari administrasi perpajakan yang meliputi tugas utamanya sebagai fasilitas, pengawasan, dan evaluasi atas kepatuhan perpajakan. Efektivitas administrasi perpajakan ini diukur dari: (1) Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), yang meliputi: kelengkapan data sebagai subjek pajak, kesesuaian pajak potensial dengan realisasi penerimaan pajak, realitas objek, dan potensi pajak yang telah dihitung; (2) Penyebarluasan pemahaman terhadap Undang-Undang Pajak, yang meliputi: sosialisasi undang-undang pajak dan pemahaman wajib pajak atas undang-undang pajak; (3) Pemeriksaan dan penagihan, yang meliputi: telah dilakukan audit, dampak audit terhadap kepatuhan, kelengkapan pembukuan wajib pajak, wajib pajak telah melakukan pembayaran, pajak terhutang ditetapkan dengan SPTPD, dan kelengkapan bukti pajak (Yudkin, 1971; Sally dan Rhoades-C, 2004; Bird, 2008; Bird & Zolt, 2008; UU Perpajakan, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diperlukan karena pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak (*tax resistance*). Seperti dikemukakan oleh Moh. Zain (2007), bahwa 1) pembayar pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, 2) pembayar pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian Farida (2005) ditemukan fakta bahwa efektivitas administrasi perpajakan tergolong cukup efektif, namun tidak didukung kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak sehingga penerimaan pajak belum optimal. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual sejak dahulu ada di perpajakan, karena jika angka kepatuhan pajak rendah maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak (Widodo & Djefris, 2010).

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Burton (2005) adalah: (1) Mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (3) Membayar & melaporkan Surat Pemberitahuan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dimaknai sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam (1) Mengisi formulir pajak, yang meliputi: WP terdaftar, Mengisi Form dengan benar, Menyampaikan form dengan tepat, dan Melaporkan dengan benar; (2) Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, yang meliputi: Menerapkan tarif dengan benar, dan Menghitung pajak dengan benar; (3) Membayar pajak yang terutang, yang meliputi: Menyetorkan sendiri, dan Ketepatan waktu setor (Nowak, 1970; Brooks, 2001; Burton, 2005; James dan Alley, 2004; Belkaoui, 2004; Zain, 2007).

Pengambilan Keputusan Manajemen

Segala tindakan yang secara sadar, merupakan pencerminan hasil proses pengambilan keputusan dalam pikirannya. Sehingga sebenarnya manusia sudah sangat terbiasa dalam membuat keputusan. Menurut McLeod (2008) mengatakan bahwa keputusan adalah tindakan yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari kesempatan yang ada. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju

mundurnya suatu organisasi. Selanjutnya hasil penelitian Delone & McLean (2003), menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan manajemen dipengaruhi oleh intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna dari kualitas sistem informasi akuntansi manajemen, informasi akuntansi manajemen dan pelayanan sistem informasi.

Pengambilan keputusan manajemen dalam penelitian ini (O'Donnell & David, 2000; Aldaijy, 2004; Hansen & Mowen, 2005; McLeod, 2008; Laudon & Laudon, 2012) dimaknai sebagai segala tindakan yang secara sadar diambil sebagai pencerminan dari hasil proses dalam (1) Identifikasi masalah (kemudahan klasifikasi dan akses data), (2) Waktu yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan (kecepatan dan ketepatan), (3) Kemampuan analisis masalah yang dihadapi (kecepatan dan ketepatan), (4) Akurasi keputusan yang diambil (kesesuaian dengan masalah dan Ketepatan sasaran), (5) Dipercayainya keputusan yang diambil (Pertentangan atas keputusan dan Dampak dari sebuah Keputusan).

Penerimaan Pajak Daerah

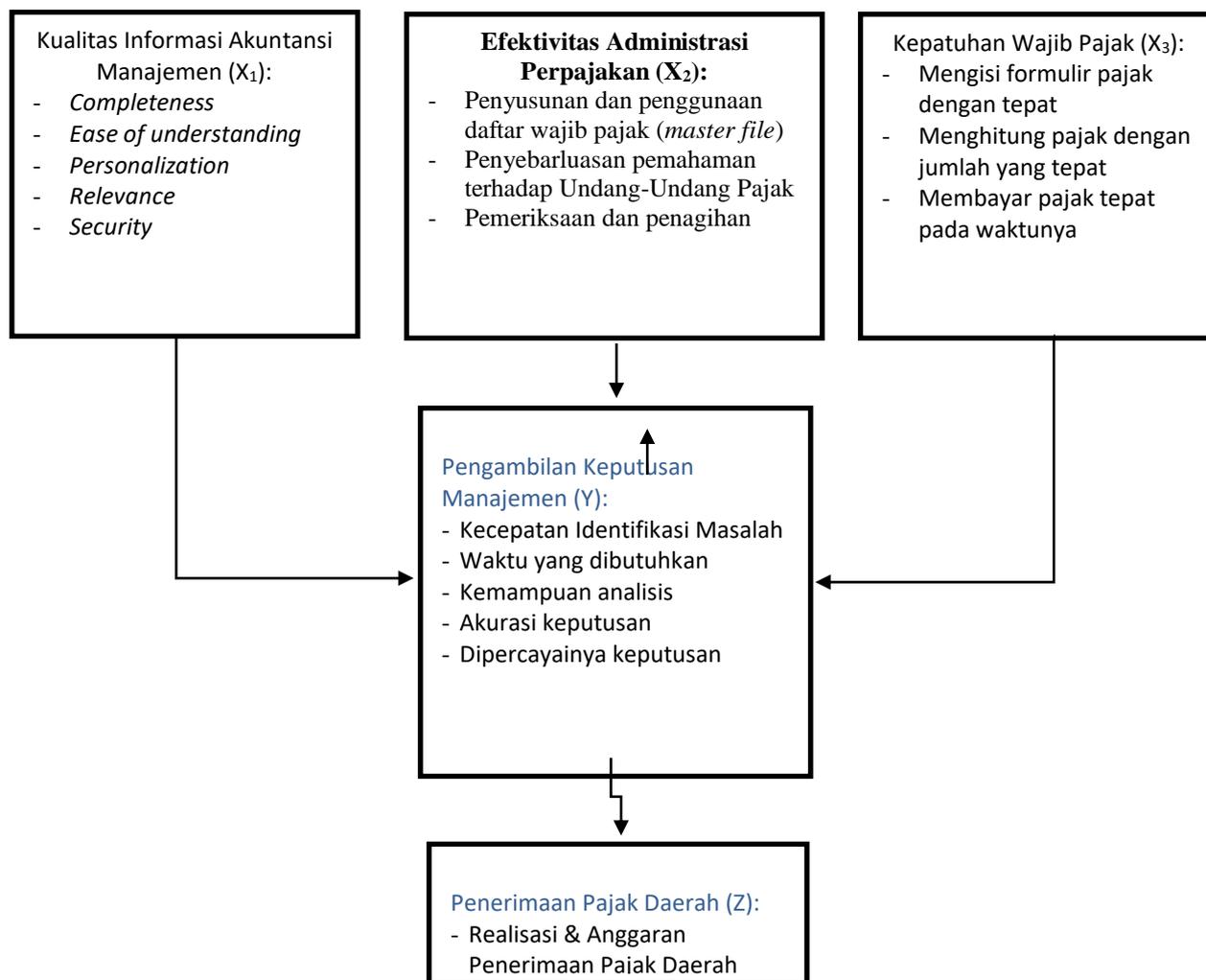
Penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini dimaknai sebagai hasil yang diterima oleh daerah berdasarkan rasio perbandingan antara realisasi dengan potensi pajak yang ada pada daerah yang bersangkutan. Penerimaan pajak daerah ini diukur melalui Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Daerah.

Provinsi Jawa barat pada dasarnya cukup memberi kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan Pajak itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, sistem dan aturan yang ada selama ini belum disesuaikan dengan keadaan Pajak Daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini mengindikasikan pentingnya sistem informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap penerimaan pajak daerah, dimana sistem informasi sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Maka keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Karena sistem informasi akan mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan.

Dengan demikian, belum jelas benar keterkaitan kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pengambilan keputusan manajemen, namun merujuk pada fenomena dan hasil penelitian terdahulu, diduga terdapat pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) terhadap penerimaan pajak daerah pada Dispenda kab/kota di Jawa Barat.

Adapun model kerangka pemikiran seperti terlihat dibawah ini:



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empirik supaya dapat dievaluasi tentang:

1. Besarnya pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial terhadap pengambilan keputusan manajemen pada dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.
2. Besarnya pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak pada dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.
3. Besarnya pengaruh pengambilan keputusan manajemen terhadap penerimaan pajak daerah pada dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.
4. Besarnya pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak langsung maupun tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) terhadap penerimaan pajak daerah pada dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Survei Penjelasan (*Explanatory Survei Method*). Bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian kuantitatif fokusnya terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. Konsekuensi penelitian ini diperlukan operasionalisasi variabel yang lebih mendasar kepada indikator-indikatornya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Dinas Pendapatan Daerah Kab/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan responden adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada masing-masing Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk Kab/ Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang diberi wewenang melakukan pemungutan pajak daerah. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian ini digunakan Analisis Jalur (*Path Analysis*), dengan alasan bahwa model ini merupakan pendekatan terintegrasi antara Analisis Korelasi (*Correlation Analysis*), yang dapat mengungkap keeratan hubungan antar variabel dan Analisis Regresi (*Regression Analysis*), yang dapat mengungkap pola hubungan antar variabel, dan merupakan analisis antara analisis data dengan konstruksi konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen (X_1)

Secara keseluruhan tanggapan responden atas pernyataan yang terkait dengan variabel kualitas informasi akuntansi manajemen, dalam kategori tinggi. Deskripsi Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen yang dipersepsikan oleh Kadispenda Kab/Kota di Jawa Barat mencapai 71,54% dari skor idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen berada pada kondisi yang sudah baik, namun belum optimal. Karena kondisi kualitas informasi akuntansi manajemen yang dicapai berada pada rentang 60,1%-80%, sedangkan nilai optimal berada pada skor 80,1% -100%.

Tabel 1. Deskripsi Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen

No.	DIMENSI	Actual Score	Ideal Score	WMS (%)	KET
1.	<i>Completeness</i>	196	260	75,38	Tinggi
2.	<i>Ease of Understanding</i>	198	260	76,15	Tinggi
3.	<i>Personalization</i>	180	260	69,23	Tinggi
4.	<i>Relevance</i>	172	260	66,15	Tinggi
5.	<i>Security</i>	178	260	68,46	Tinggi
Jumlah dan Rata-rata		744	1040	71,54	Tinggi

Deskripsi Efektivitas Administrasi Perpajakan (X_2)

Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas pernyataan yang terkait dengan variabel efektivitas administrasi perpajakan, dalam kategori tinggi. Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak yang dipresepsikan oleh Kadispenda Kab/Kota di Jawa Barat mencapai 64,23% dari skor idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berada pada kondisi yang sudah baik, namun belum optimal. Karena kondisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dicapai berada pada rentang 60,1%-80%, sedangkan nilai optimal berada pada skor 80,1% -100%.

Tabel 2. Deskripsi Efektifitas Administrasi Perpajakan

No.	DIMENSI	Actual Score	Ideal Score	WMS (%)	KET
1.	Penyusun dan Penggunaan Daftar Wajib Pajak	373	520	71,73	Tinggi
2.	Penyebarluasan Pemahaman Terhadap Undang-undang Pajak	195	260	75,00	Tinggi
3.	Pemeriksaan dan Penagihan	579	780	74,23	Tinggi
Jumlah dan Rata-rata		1147	1560	73,53	Tinggi

Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (X₃)

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan tanggapan responden atas pernyataan yang terkait dengan variabel kepatuhan wajib pajak, dalam kategori tinggi. Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak yang dipresepsikan oleh Kadispenda Kab/Kota di Jawa Barat mencapai 64,23% dari skor idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berada pada kondisi yang sudah baik, namun belum optimal. Karena kondisi Kepatuhan Wajib Pajak yang dicapai berada pada rentang 60,1%-80%, sedangkan nilai optimal berada pada skor 80,1% -100%.

Tabel 3. Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak

No.	DIMENSI	Actual Score	Ideal Score	WMS (%)	KET
1.	Mengisi formulir pajak	363	520	69,81	Tinggi
2.	Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat	143	260	55,00	Sedang
3.	Membayar pajak yang terutang	162	260	62,31	Tinggi
Jumlah dan Rata-rata		668	1.040	64,23	Tinggi

Deskripsi Pengambilan Keputusan Manajemen (Y)

Secara keseluruhan tanggapan responden atas pernyataan yang terkait dengan variabel pengambilan keputusan manajemen, dalam kategori tinggi. Deskripsi Pengambilan Keputusan Manajemen yang dipresepsikan oleh Kadispenda Kab/Kota di Jawa Barat mencapai 68,75% dari skor idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengambilan Keputusan Manajemen berada pada kondisi yang sudah baik, namun belum optimal. Karena kondisi Pengambilan Keputusan Manajemen yang dicapai berada pada rentang 60,1%-80%, sedangkan nilai optimal berada pada skor 80,1 % -100%.

Tabel 4. Deskripsi Pengambilan Keputusan Manajemen

No.	DIMENSI	Actual Score	Ideal Score	WMS (%)	KET
1.	Identifikasi masalah	189	260	72,69	Tinggi
2.	Waktu yang di butuhkan dalam mengambil keputusan	185	260	71,15	Tinggi
3.	Kemampuan analisis masalah yang dihadapi	195	260	75,00	Tinggi
4.	Akurasi keputusan yang diambil	216	260	83,08	Sangat Tinggi
5.	Dipercayainya keputusan yang diambil	146	260	56,15	Sedang
Jumlah dan Rata-rata		715	1.040	68,75	Tinggi

Deskripsi Penerimaan Pajak Daerah (Z)

Menurut hasil penelitian, tanggapan responden atas pernyataan yang terkait dengan variabel penerimaan pajak daerah, dalam kategori sedang. Deskripsi Penerimaan Pajak Daerah Kab/Kota di Jawa Barat mencapai 59,42% dari skor Potensial Pajak pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berada pada kondisi yang cukup baik, namun belum optimal. Karena kondisi Penerimaan Pajak Daerah yang diacapai berada pada rentang 40,1%-60%, sedangkan nilai optimal berada pada skor 80,1%-100%.

Tabel 5. Deskripsi Penerimaan Pajak Daerah

No.	INDIKATOR	Realisasi Penerimaan Pajak	Potensi Penerimaan Pajak	WMS (%)	KET
1.	Pajak Hotel	620.964.996,14	872.909.992,38	71,14	Tinggi
2.	Pajak Restoran	416.828.293,94	603.644.507,98	69,05	Tinggi
3.	Pajak Hiburan	36.545.176,80	59.372.941,97	61,55	Tinggi
4.	Pajak Reklame	127.688.332,95	235.998.067,56	54,11	Sedang
5.	Pajak Penerangan Jalan	117.315.170,57	251.376.666,70	46,67	Sedang
6.	Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C	41.267.164,26	334.030.041,24	12,35	Sangat Rendah
7.	Pajak Parkir	105.892.248,90	171.769.497,90	61,65	Tinggi
8.	Pajak Air Tanah	31.321.205,80	92.042.427,70	34,03	Rendah
9.	Pajak Sarang Burung Walet	30.467.165,58	82.534.394,62	36,91	Rendah
10.	PBB	301.316.502,96	406.623.808,02	74,10	Tinggi
11.	BPHTB	197.999.033,73	301.998.067,56	65,56	Tinggi
Jumlah		2.027.605.291,63	3.412.300.413,63	59,42	Sedang
Rata-rata		184.327.753,78	310.209.128,51	59,42	Sedang

Hasil Pengujian Hipotesis Satu

Hipotesis satu yang akan diuji adalah pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektifitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Satu

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Korelasi	Koefisien Jalur	R ² (R ²)	F _{Change} ; t _{test}	F _{Tab} ; t _{tab}	Kesimpulan
X ₁ , X ₂ , dan X ₃ simultan → Y			0,809369	26,582	3,049	H ₀ Reject
X ₁ parsial → Y	0,7137	0,3364	0,240089	2,9736	2,064	H ₀ Reject
X ₂ parsial → Y	0,7296	0,3401	0,248137	2,9366	2,064	H ₀ Reject
X ₃ parsial → Y	0,7670	0,4187	0,321143	3,6115	2,064	H ₀ Reject

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel Y terbukti secara nyata ($p_{value}=0.000$; $\alpha=0,05$) dipengaruhi oleh X₁ secara parsial (24,01%), X₂ (24,81%), X₃ (32,11%). Ketiga variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen sebesar 80,94%. Hal ini menunjukkan pengaruh yang tinggi namun belum optimal, karenamasih ditemukan angka sebagai faktor residu (19,07%) yang turut berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen selain Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen, Efektivitas Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama tersebut, maka dapat dibentuk model persamaan statistik, sebagai berikut:

$$Y = 0,3364X_1 + 0,3401X_2 + 0,4187X_3 + 0,1907$$

Hasil Pengujian Hipotesis Dua

Hipotesis dua yang akan diuji adalah pengaruh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektifitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Dua

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Korelasi	Koefisien Jalur	R ² (R ²)	F _{Change} ; t _{test}	F _{Tab} ; t _{tab}	Kesimpulan
X ₁ , X ₂ , dan X ₃ simultan → Z			0,4998	7,3275	3,049	H ₀ Reject
X ₁ parsial → Z	0,6167	0,0264	0,0163	0,2235	2,064	H ₀ Reject
X ₂ parsial → Z	0,7444	0,2425	0,1805	2,1152	2,064	H ₀ Reject
X ₃ parsial → Z	0,8191	0,3699	0,3030	2,8716	2,064	H ₀ Reject

Berdasarkan hasil pengujian, X₁ secara parsial tidak terbukti mempengaruhi variabel Z. Dan dapat dilihat bahwa variabel Z secara parsial terbukti secara nyata ($p_{value}=0.000$; $\alpha=0,05$) dipengaruhi oleh X₂ (18,05%), X₃ (30,30%). Kemudian pengaruh ketiga variabel X tersebut terhadap variabel Z secara simultan sebesar 49,98%. Pengaruh simultan menunjukkan nilai yang cukup tinggi (sedang), namun pengaruh tersebut belum optimal karenamasih ditemukan angka faktor residu (50,02%) yang turut berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah selain Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen, Efektivitas Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua tersebut, maka dapat dibentuk model persamaan statistik, sebagai berikut:

$$Z = 0,1611X_1 + 0,3787X_2 + 0,5376X_3 + 0,1784$$

Hasil Pengujian Hipotesis Tiga

Hipotesis tiga yang akan diuji adalah pengaruh pengambilan keputusan manajemen terhadap penerimaan pajak daerah.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Tiga

Hubungan Antar Variabel	Koefisien Korelasi	Koefisien Jalur	R ² Square (R ²)	t _{test}	t _{tab}	Kesimpulan
Y parsial → Z	0,8800	0,4005	0,3524	2,1338	2,064	H ₀ Reject

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel Z terbukti secara nyata ($p_{value}=0.000$; $\alpha=0,05$) dipengaruhi oleh variabel Y (35,24%). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga tersebut, maka dapat dibentuk model persamaan statistik, sebagai berikut:

$$Z = 0,4005Y + 0,6476$$

Hasil Pengujian Hipotesis Empat

Pengujian hipotesis keempat tentang Pengaruh Kualitas informasi Akuntansi Manajemen, Efektifitas Administrasi Perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui pengambilan keputusan manajemen, dianalisis dengan menggunakan **Sobel test** (Kline, 2011: 164), yaitu dengan mengalikan koefisien dari masing-masing jalur. **Sobel test** digunakan untuk menemukan bukti empirik agar dapat dievaluasi dan dianalisis pengaruh Kualitas informasi Akuntansi Manajemen, Efektifitas Administrasi Perpajakan, kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) terhadap Penerimaan Pajak Daerah, maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Empat

Hubungan Variabel	Perhitungan Penagruh Tidak Langsung	R ² Square (R ²)	t _{test}	t _{tab}	Kesimpulan
X ₁ parsial → Z	$(.0264)(.7137)(.4005)=0,0075$	0,0075	1,734	2,064	H ₀ Do not Reject
X ₂ parsial → Z	$(.2425)(.7296)(.4005)=0,0709$	0,0709	1,726	2,064	H ₀ Do not Reject
X ₃ parsial → Z	$(.3699)(.7670)(.4005)=0,1136$	0,1136	1,837	2,064	H ₀ Do not Reject

Hasil pengujian hipotesis keempat menggambarkan bahwa Kualitas informasi Akuntansi Manajemen, Efektifitas Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Artinya hipotesis yang menyatakan Kualitas informasi Akuntansi Manajemen, Efektifitas Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dispenda Kab/Kota di Jawa Barat, **tidak dapat diterima**. Dengan kata lain pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen, Efektifitas Administrasi Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dispenda Kab/Kota di Jawa Barat **tidak bermakna**.

Hasil penelitian ini bertentangan hasil penelitian De Lone & Mc Lean (2003), Aldaiyy (2004) yang membuktikan bahwa *system quality* (administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak) dan *information quality* (kualitas informasi akuntansi manajemen) dipengaruhi oleh variabel *individual impact* (pengambilan keputusan manajemen), yang kemudian berpengaruh

terhadap variabel *organizational impact* yang dimaksud adalah tercapainya tujuan suatu organisasi yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah.

SIMPULAN

a. Simpulan

- 1) Kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama menunjukkan kontribusi tinggi dan signifikan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada Dispenda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan secara parsial, kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan manajemen pada Dispenda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun variabel kualitas informasi akuntansi manajemen memberikan kontribusi yang terendah diantara kedua variabel lainnya terhadap pengambilan keputusan manajemen. Artinya pengambilan keputusan manajemen dipengaruhi baik secara simultan maupun secara parsial oleh kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pada Dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.
- 2) Kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama menunjukkan kontribusi tinggi dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dispenda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan secara parsial, kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan penerimaan pajak pada Dispenda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun variabel kualitas informasi akuntansi manajemen memberikan kontribusi yang terendah di antara kedua variabel lainnya terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya peningkatan penerimaan pajak daerah dipengaruhi baik secara simultan maupun secara parsial oleh peningkatan kualitas informasi akuntansi manajemen, peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.
- 3) Pengaruh Pengambilan Keputusan Manajemen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Dispenda kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu indikator dipercayainya keputusan yang diambil oleh pimpinan masih dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar keputusan yang diambil oleh kepala Dispenda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih menimbulkan pertentangan dan pernah menimbulkan dampak negatif.
- 4) Kualitas informasi akuntansi manajemen, efektivitas administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan penerimaan pajak pada Dispenda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Artinya peningkatan penerimaan pajak daerah tidak dipengaruhi baik secara parsial tidak langsung (melalui pengambilan keputusan manajemen) oleh peningkatan kualitas informasi akuntansi manajemen, peningkatan efektivitas administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Dispenda Kab/Kota di Jawa Barat.

b. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang pertama, diharapkan dapat meningkatkan secara bertahap mengenai kualitas informasi akuntansi manajemen yang dihasilkan oleh bagian yang terkait

sebagai salah satu alat pendukung dalam pengambilan keputusan, supaya tidak terjadi pertentangan atau permasalahan yang akan timbul di masa yang akan datang.

- 1) Berdasarkan kesimpulan kedua, dimungkinkan ada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas informasi akuntansi manajemen sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, sehingga sistem akuntansi yang digunakan dapat menyesuaikan dan mendukung berbagai kebutuhan organisasi yang terkait yaitu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- 2) Berdasarkan kesimpulan yang keempat, diharapkan dapat melakukan penelitian lain terhadap faktor-faktor lain seperti faktor birokrasi organisasi, faktor kesejahteraan wajib pajak, faktor korupsi yang berhubungan dalam judul penelitian ini.
- 3) Terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini:
 - i) Penelitian mengenai kualitas informasi akuntansi manajemen ini hanya diukur dari beberapa indikator saja.
 - ii) Penelitian yang dilakukan hanya pada Dispenda kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Barat, sehingga penelitian ini hanya menggambarkan kondisi di wilayah provinsi Jawa Barat.
 - iii) Penelitian bersifat cross sectional, yakni mengambil sampel kejadian pada saat tertentu, sehingga pengukuran kualitas informasi akuntansi, efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengambilan keputusan manajemen, hanya mencerminkan kejadian satu waktu, sedangkan perubahan kejadian setiap waktu tidak dapat diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldaiyy, Emad Y. 2004. *Multidimensional Measurements of Geographic Information Systems (GIS) Effectiveness in Crisis Management*. Command and Control Research and Technology Symposium The Power of Information Age Concepts and Technologies. pp 1-24
- Alink, Matthijs and Victor Van Kommer. 2009. *The Dutch Approach: Description of the Dutch Tax Administration*, Second Revised Edition, IBFD, p. 17.
- Anthony, R. N. 2003. *Management-Recounting: A Personal History*. Journal of Management Accounting Research (15): 249-253.
- Arya, A., J. C. Fellingham and D. A. Schroeder, 2004. *Aggregation and Measurement Errors in Performance Evaluation*. Journal of Management Accounting Research (16): 93-105.
- Balakishnan, R. and K. Sivaramakrishnan. 2002. *A Critical Overview of the use of full-cost data for planning and pricing*. Journal of Management Accounting Research (14): 3-31.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2004. *Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale*. <http://www.ssrn.com>
- Bird, Richard M. & Zolt, Eric M. 2008. *Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse*. Melalui <http://www.ssrn.com>
- Bird, Richard M. 2008. *The BLLR Approach to Tax Reform in Emerging Countries*. Melalui <http://www.ssrn.com>
- Brooks, Neil. 2001. *Presentation Paper Key of Issues in Income Tax: Challenges of Tax Administration and Compliance*. 2001 Tax Conference. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Burton, Richard. 2005. *Menuju Wajib Pajak Patuh*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol 5 No. 1 Agustus 2005. Hal 36-39.
- Chapman, Christopher S. Anthony G. Hopwood, Michael D. Shields., 2007. *Handbook of Management Accounting Research*. Elsevier.
- Choe, Jong-min, 2004. *Impact of Management Accounting Information and AMT on Organizational Performance*. Journal of Information Technology, Volume 19, Number 3, September 2004 , pp. 203- 214(12).
- Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods: 9th Ed*. International edition. Mc Graw Hill.
- Cooper, Robin dan Robert S Kaplan. 1998. *The Design of Cost Management Systems: Text and Cases*. New Jersey: Prentis Hall.
- De Lone, WH & McLean, ER. 2003. *The De Lone and McLean Model of Information Systems Success: a ten year update*. Journal of Management Information Systems Vol.19 No.4, pp 9-30.
- Dhavale, D. G. 2007. *Product Costing For Decision Making in Certain Variable-proportion technologies*. Journal of Management Accounting Research (19): 51-70 .
- Dikolli, S. S. and K. L. Sedatole. 2007. *Improvements in the information content of nonfinancial forward-looking Performance measures: A taxonomy and empirical application*. Journal of Management Accounting Research (19): 71-104 .
- Dreachslin, Janice L. 1998. Information Technology and quality Improvement. International Journal of Technology Management (ITN) ISSN : 0267 - 5730, Vol: XV 1998 p: 237 - 255.
- Emerson, John. 1998. *Information Technology : The key to successful 1 : 1 Relationship*. Journal of Managed Healthcare (MHR) ISSN : 1060-1392 Vol :Vm Date: April 1998 p : 16 - 21.

- Farida Ariyani, 2005, *Pengaruh Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah*. Tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAD
- Feld, Lars P. & Frey, Bruno S. 2007. *Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation*. Law & Policy Journal , Vol. 29, No. 1, January 2007.
- Hamilton, Stuart. 2003. *Putting the Client First: The Emerging Cooperation Copernican Revolution of Tax Administration*. Tax Notes International, pp. 571-572.
- Hall, James A. 2007. *Accounting Information Systems*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A. 2013. *Accounting Information Systems 8 Ed*. South Western: Cengage Learning.
- Hansen, Mowen R. Don dan Maryanne Mowen, 2006. *Management Accounting*. Ohio: International Thomson Publishing Co.
- Harahap, Parlaungan. 2004. *Pengaruh pemanfaatan informasi akuntansi manajemen dalam proses pengambilan keputusan terhadap kinerja keuangan PDAM*. Tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAD.
- Heni Nuraeni Kartikayanti, 2011, *Desertasi: Pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi manajemen, informasi akuntansi manajemen dan pelayanan sistem informasi terhadap intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna serta dampaknya terhadap kinerja pengambilan keputusan manajemen operasional*. Tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAD.
- Horngren, Charles T., George Foster, Srikant M. Datar. 2005. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 11th Edition. Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice-Hall International Inc.
- James, S. & Alley, C. 2004. *Tax Compliance, Self Assesment and Tax Administration*. Journal of Finance and Management in Public Services, Vol. 2 No. 2:27-42.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jones, Selly M. and Shelley C. Rhoades-catanach. 2004. *Principles of taxation: Advanced Strategies*. Boston: Irwin.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kadarsah Suryadi & M. Ali Ramdhani. 1998. *Sistem pendukung keputusan: suatu wacana struktural idealisasi dan implementasi konsep pengambilan keputusan*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Laudon, Kenneth C. dan Jane P. Laudon, 2005. *Essentials of Management Information Systems: managing the digital firm*. New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon., 2012. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 12th Edition. Prentice Hall
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masyhur, Hadi (2012). *Role In Monitoring Committee Improving Compliance With Taxpayers And Effect On Revenue Tax Increase Perspective On Administration*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis. Vol. 03. No.02, September., pp. 90-102.
- McGee, Robert W. *Taxation And Public Finance: A Philosophical And Ethical Approach*. Melalui <http://www.ssrn.com>
- McLeod, Raymod Jr., and George Schell. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat
- Mizuar. 2003. Tesis: *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan BUMS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan*. Tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAD.
- Muhammad Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Muhammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Zain, 1991, *Desertasi: Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan (Pendekatan dari Beberapa Aspek)*, tidak dipublikasikan, Bandung: UNPAD.
- Murti Sumarni & Salamah Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Musgrave, Richard A.& Musgrave, Peggy B. 1989. *Public Finance In Theory and Practice. Fifth Edition*. New York: McGraw Hill.
- Nowak, Norman D. 1970. *Tax Administration in Theory and Practice: With Special Reference in Chile*. New York: Praeger Publisher.
- O'Brien, James A. & Marakas, George M. 2010. *Introduction To Information Systems*. Fifteenth Edition. New York: McGraw Hill Irwin,.
- O'Donnell, E. & David, J.S. 2000. *How information Systems User Decisions: A research Framfork and Literature Review*. International Journal of Accounting Information Systems. February.
- Pemerintah RI, 2004. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta:
- Pemerintah RI, 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:
- Pemerintah RI, 2004. UU No. 25/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta:
- Purnomo, Hadi 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal (pemikiran, konsep dan implementasi)* : Editor Anggito abimanyu & Andie megantara. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT. ERESKO.
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Romney, M.B. and Steinbart, P.J. 2012. *Accounting Information System*. 12th Edition. England: Pearson Education Limited.
- Romney, Marshall B., dan Paul John Steinbart., 2006. *Accounting Information System*. 9th Edition. Prentice Hall.
- Rusdin. 2004. *Analisis Rasio pajak dalam memprediksi kapasitas, upaya, dan kinerja perpajakan Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 1. No.3 November, pp. 285-304.
- Salusu J., 1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: PT. Grasindo
- Scales, Sirena J. 2005. Bangladesh: Parliament Approves Creation of Tax Ombudsman Post. *Tax Notes International*, pp. 222.
- Scott, Gustav and Felix Gyllenstedt., 2006. *Strategic Management Accounting in the Knowledge Economy : Interplay between Control and Strategy in IT Consultancy. Independent thesis Advanced level (Degree of Magister)*. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration Department.
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Methods For Bussiness: A Skill Building Approach*. Fifth Edition. New York: John Willey & Sons Inc.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi: Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

- Simon, Herbert A., 1997. *The New Science of Management Decisions*. Englewoods Cliffs-New York: Prentice Hall.
- Sommerfeld, Ray M. Madeo, Silvia A. Anderson, Kenneth E. Jackson, Betty R. 1994. *Concept of Taxation*. Forth Worth: The Dryden Press.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit CV.Alfabeta.
- Sumarlan. 2004. *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen dan Kualitas Manajer dalam Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Keuangan*. Tidak dipublikasikan. Bandung: UNPAD.
- Supranto, J. 2005. *Teknik Pengambilan Keputusan: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Azhar 2007. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan pengembangannya*. Edisi 3. Bandung: Lingga Jaya.
- Tubagus Chairul Amachi Zandjani. 1992. *Perpajakan*, Jakarta: PAU-UI dan Gramedia.
- Wilkinson, J.W. Cerullo, M.J. Raval, V. & Wing, B.W. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Application*. John & Sons. Inc.
- Widodo, Widi., Djefris, Deddy. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yudkin, Leon. 1971. *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration: International Tax Program*. Harvard Law School, Cambridge, The President and Fellows of Harvard College.



JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU
Vol.10 No.2, Oktober 2017
Hal. 204 - 222

